PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

SKRIPSI

TRI CAHAYA HARTATI

B1031221103

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tri Cahaya Hartati
NIM	: B1031221103
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 15 Juli 2025

Tri Cahaya Hartati

NIM. B1031221103

PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tri Cahaya Hartati
NIM	: B1031221103
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini hasil karya saya sendiri dan semua sumber data informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 15 Juli 2025

Tri Cahaya Hartati
NIM. B1031221103

LEMBAR YURIDIS

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Penanggung Jawab Yuridis

Tri Cahaya Hartati
B1031221103

Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif	: 23 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak. NIP. 196306301990021001	6/8/2026	
2.	Sekretaris Penguji	Ira Grania Mustika, S.E., MM. NIP. 196911151996032002	6/8/2026	
3.	Penguji 1	Gita Desyana, S.E., M.M., Ak., CA. NIP. 197212252000122001	05/08 2026	
4.	Penguji 2	Ika Nur Azmi, S.E., M.Ak., Ak. NIP. 199003152023212050	05/08 2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 27 AUG 2026
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pegaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening" dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun dan diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta semangat secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang selalu melihat, mendengar penulis berkeluh kesah tentang proses yang penulis jalankan. Mungkin penulis bukanlah hamba yang selalu taat kepada Engkau, tapi hamba mu ini selalu berusaha agar tidak melupakan siapa yang telah menciptakannya, siapa yang melancarkan setiap jalan yang ditepuhnya, siapa yang selalu berada disisnya setiap kali susah senang menghampirinya.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Ira Grania Mustika, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis disaat masa kuliah hingga saat penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Haryono selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan waktu mengenai penulisan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Gita Desyana selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan waktu, arahan dan masukan penulisan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Ika selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan waktu, arahan dan masukan penulisan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura terkhusus Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staff dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam bagian administrasi selama masa perkuliahan.
11. Teruntuk Mamak. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus Mamak panjatkan, atas nasihat serta kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar penulis. Di saat penulis lelah dan hampir menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, suara mamaklah yang selalu membuat saya kembali bangkit. Segala pengorbanan, air mata, dan kasih saying mamk tidak akan pernah bisa penulis balas. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mamak, sebagai bukti kecil dari perjuangan besar Mamak selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang untuk Mamak.
12. Teruntuk Bapak. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan. Terima kasih atas kerja keras, keringat, dan pengorbanan Bapak untuk membiayai dan mendukung materi, moril, serta pendidikan penulis hingga sampai di titik ini. Terima kasih atas didikan tegas namun penuh kasih, atas setiap nasihat bijak yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, dan membalas setiap kebaikan Bapak dengan keberkahan yang berlimpah.
13. Teruntuk Abang, Kakak, Kak Yati, Amrullah, dan Rizvan. Terima kasih atas dukungan moril, doa, dan bantuan yang telah diberikan selama proses

penyusunan skripsi. Dukungan keluarga sangat berarti dan menajdi motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga akhir. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan keluarga dengan keberkahan yang berlimpah.

14. Teruntuk kedua Nenek penulis yang berpulang disaat penulis sedang berjuang menyelesaikan skripsi dan berpulang setelah skripsi ini berakhir. Terima kasih atas segala kasih sayang, pelukan yang selalu diberikan selama semasa hidup. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Nenek, menerima segala amal ibadahnya, dan menempatkan Nenek di Surga-Nya yang paling indah.
15. Teruntuk keluarga besar Mamak dan Bapak, terima kasih atas dukungan, doa, saran, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama masa pendidikan. Beribu doa penulis lantunkan agar keluarga besar selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Teman-teman "Daijin Squad" yang menemani dari masa maba yaitu Dinda, Dian, dan Zila, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama masa kuliah.
17. Teman-teman "Hamba Allah" yaitu Adilla, Inna, Neni, Hettrix, Nanda, dan Yusup. Pertemanan yang terjalin diakhir masa kuliah ini makin terasa berat untuk diakhiri. Terima kasih selalu saling menyemangati, memberikan keceriaan, serta kenangan-kenangan baik selama masa kuliah.
18. Teman-teman yang menemani penulis sejak masa SMA yaitu, Rahma, Fazha, Mutia, Nina, Vika, Salwa, Atika, dan Riki. Terima kasih atas semangat, doa, dukungan, serta kebersamaan yang masih terjalin hingga saat ini.
19. Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023/2024 dan teruntuk bidang Art & Sport. Terima kasih atas kebersamaan satu periodenya, doa, semangat dan pengalaman yang didapatkan.
20. Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2024/2025 dan teruntuk bidang Humas dan Advokasi, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yamg diberikan. Satu periode yang sangat menyenangkan, mendapatkan banyak pengalaman barus, serta rasa kebersamaan dan kekeluargaan humas yang

terjalin baik. Terima kasih untuk Jija, Feeza, Sella, Dela, dan Haini yang membuat humas lebih berwarna dan penuh tawa.

21. Teruntuk teman yang sudah penulis kenal sejak lama yaitu Safitri, tidak terhitung berapa banyak kebaikan, semangat, serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu memberikan waktu dan tenaga disaat penulis membutuhkan, mendengarkan cerita penulis, serta bertumbuh bersama. Penulis berharap hal-hal baik selalu menyertainya, dimudahkan dan dilancarkan setiap jalan yang dipilihnya.
22. Teruntuk seseorang yang tanpa sengaja mengingatkan penulis dengan ayat:

    فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

    "Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." (Q.S. Al-Insyirah: 5)
23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintanga, rasa lelah, dan keinginan untuk berhenti dipertengahan. Terima kasih karena telah berjuang dengan sangat keras, begadang, menahan stress dan tetap berusaha menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih karena memilih untuk lanjut, bahkan disaat tidak ada yang tahu sesulit apa perjuangan ini. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tapi tentang bagaimana kamu belajar untuk tetap kuat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan begitu, penulis memohon maaf yang sebesar- besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah informasi, wawasan, dan ilmu bagi pembacanya.

Pontianak, 24 Agustus 2026

Tri Cahaya Hartati
B1031221103

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Tri Cahaya Hartati
B1031221103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian meliputi 14 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah tahun 2020–2024. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maupun pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, alokasi Belanja Modal belum mampu menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara sumber pendapatan daerah dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, PLS-SEM.

THE EFFECT OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE AND BALANCING FUNDS ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE WITH CAPITAL EXPENDITURE AS AN INTERVENING VARIABLE

Tri Cahaya Hartati
B1031221103

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Balancing Funds on Local Government Financial Performance, with Capital Expenditure as an intervening variable, in regency and city governments in West Kalimantan Province during the 2020–2024 period. This study employs a quantitative approach with a causal associative research design. The research population consists of 14 regency and city governments in West Kalimantan Province. The sampling technique used is saturated sampling, in which the entire population is included as the research sample. The data used are secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) of local governments for the 2020–2024 period. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with the assistance of SmartPLS 4 software.

The results show that Local Own-Source Revenue has a positive and significant effect on Local Government Financial Performance. Balancing Funds have a negative and significant effect on Local Government Financial Performance. Meanwhile, Capital Expenditure is unable to mediate the effect of Local Own-Source Revenue on Local Government Financial Performance or the effect of Balancing Funds on Local Government Financial Performance. Furthermore, the allocation of Capital Expenditure has not been able to serve as a mechanism that bridges the relationship between local revenue sources and improvements in local government financial performance.

***Keywords**: Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance, PLS-SEM*

RINGKASAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

1. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pengelolaan Belanja Modal menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan.

PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan mencerminkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan secara mandiri. Sementara itu, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi serta mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Di sisi lain, Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ketiga aspek tersebut dipandang memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Fenomena penelitian menunjukkan bahwa kemampuan PAD kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih beragam. Pada periode 2020–2024, PAD tertinggi tercatat di Kota Pontianak pada tahun 2024 sebesar Rp593.775.839.762, sedangkan PAD terendah tercatat di Kabupaten Melawi pada tahun 2020 sebesar Rp30.872.004.587. Di sisi lain, Dana Perimbangan masih menjadi sumber penerimaan yang besar bagi banyak daerah. Dana Perimbangan tertinggi dalam data penelitian terdapat pada Kabupaten Ketapang tahun 2023 sebesar Rp1.911.207.427.498. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

2. Permasalahan

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian hipotesis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan belanja modal sebagai variabel perantara (*intervening*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Squares* (PLS) merupakan pendekatan alternatif yang merupakan pergeseran dari *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis kovarian menjadi SEM berbasis varian. SEM berbasis kovarian, seperti AMOS dan LISREL, umumnya digunakan untuk menguji kausalitas atau teori dengan jumlah sampel yang relatif besar, yaitu sekitar 200–400 sampel, sedangkan PLS lebih menekankan pada kemampuan prediktif model. PLS memungkinkan analisis secara langsung terhadap variabel yang dibentuk oleh indikator refleksif dan formatif.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari laporan realisasi APBD Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat tahun 2020-2024.

Data yang diambil berupa data realisasi dari PAD, dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja modal yang didapatkan dari website setiap kabupaten/ kota. Untuk memperoleh data yang relevan dan layak dianalisis, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui penelaahan dokumen dan sumber data yang diperlukan, kemudian dilakukan proses penghitungan serta pencatatan dengan cara menghimpun informasi yang berkaitan secara langsung guna mendukung penyelesaian permasalahan penelitian berdasarkan data yang valid dan relevan.

5. Hasil dan Pembahasan

Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kalimantan Barat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang mampu dihimpun oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kalimantan Barat. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh yang negatif sehingga hipotesis tidak diterima. Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kalimantan Barat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian dapat dijawab bahwa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan lebih bersifat langsung daripada melalui peningkatan belanja modal. Artinya, peningkatan pendapatan asli daerah belum tentu diikuti oleh optimalisasi belanja modal yang mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal juga tidak mampu memediasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kalimantan Barat. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dapat dijawab bahwa dana perimbangan tidak memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana

transfer yang diterima pemerintah daerah belum sepenuhnya diarahkan pada belanja modal yang mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan.

Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kalimantan Barat. Pertanyaan penelitian dapat dijawab bahwa peningkatan maupun penurunan belanja modal belum mampu memberikan perubahan yang berarti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan aset yang dihasilkan

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Belanja modal juga tidak mampu memediasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rekomendasi

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta perbaikan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah sampel, memperpanjang periode pengamatan, atau membandingkan antarprovinsi sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK viii
RINGKASAN SKRIPSI x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kesenjangan Penelitian 7
1.3 Rumusan Masalah 7
1.3.1 Pernyataan Masalah 7
1.3.2 Pertanyaan Penelitian 8
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Kontribusi Penelitian 8
1.5.1 Kontibusi Teoritis 8
1.5.2 Kontribusi Praktis 9
1.6 Gambaran Kontekstual Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 60
2.1 Landasan Teori 60
2.1.1 Teori Keagenan *(Agency Theory)* 60
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah 61
2.1.3 Dana Perimbangan 62
2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 63
2.1.5 Variabel *Intervening* 63
2.1.6 Belanja Modal 64

2.2 Kajian Empiris 65
2.3 Kerangka Konseptual 69
2.4 Hipotesis Penelitian 70
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 70
2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 71
2.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Belanja Modal 72
2.4.4 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Belanja Modal 72
2.4.5 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 73
BAB III METODE PENELITIAN 60
3.1 Bentuk Penelitian 60
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 60
3.3 Data 60
3.4 Populasi dan Sampel 61
3.5 Variabel Penelitian 62
3.5.1 Variabel Independen (X) 62
3.5.2 Variabel Dependen (Y) 63
3.5.3 Variabel Perantara (*Intervening*) (Z) 63
3.6 Metode Analisis 64
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 64
3.6.2 Analisis Statistik Inferensial 64
3.6.4 Metode VAF 68
3.6.5 Uji Hipotesis 68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60
4.1 Hasil Penelitian 60
Analisis Statistik Deskriprif 60
4.1.1 Analisis Statistik Inferensial 61
4.1.2 Evaluasi Pengukuran Model 61

4.1.3 Uji Hipotesis 66
4.1.4 Metode VAF 68
4.2 Pembahasan 70
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 70
4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 71
4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Belanja Modal 72
4.2.4 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Belanja Modal 73
4.2.5 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 74
BAB V PENUTUP 60
Simpulan 60
Keterbatasan Penelitian 61
Rekomendasi 61
DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 PAD Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2020-2024..... 4
Tabel 1. 2 Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Kaliamntan Barat Tahun 2020-2024..... 6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 65
Tabel 3 1 Daftar Populasi dan Sampel Kabupaten/Kota Kalimantan Barat..... 61
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskripstif..... 60
Tabel 4. 2 Hasil Uji Convergent Validity 62
Tabel 4. 3 Hasil Uji Discriminant Validity..... 63
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliability 64
Tabel 4. 5 Hasil Uji R^2 65
Tabel 4. 6 Hasil Uji F-Test 66
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hipotesis Langsung 67
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis Tidak Langsung 68
Tabel 4. 9 Hasil Uji VAF..... 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah sejak era otonomi daerah pada tahun 1999 serta ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Namun undang-undang tersebut telah diganti oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama keberhasilan otonomi, di mana daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dengan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah menurut (Sommaliagustina, 2019) adalah bentuk demokrasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola urusan rumah tangga sendiri sesuai hukum dan peraturan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyesuaikan pengembangan daerah dengan potensi lokal.

Kinerja keuangan daerah menunjukkan efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik (Padang & Padang, 2023). Kinerja keuangan khususnya dalam konteks pemerintah daerah, berfungsi sebagai indikator penting atas keberhasilan dan efisiensi pengelolaan sektor publik. Kinerja keuangan mencakup kemampuan entitas pemerintah untuk menghasilkan pendapatan, mengelola pengeluaran, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Andriani, 2023). Ukuran kinerja keuangan yang komprehensif tidak hanya mengevaluasi kesehatan fiskal pemerintah daerah saat ini, tetapi juga mengukur kapasitas mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan publik (Safitry et al., 2021).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kerangka kerja yang multifaset yang mencakup pengelolaan sumber PAD, dana perimbangan, dan pengeluaran. Menurut (Andriani, 2023) kinerja keuangan didefinisikan oleh

seberapa baik pemerintah daerah dapat mengeksplorasi dan mengelola sumber daya keuangan asli untuk mendukung operasi pemerintah dan memberikan layanan penting tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan pemerintah pusat. Gagasan kinerja ini terkait erat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang sangat penting dalam memastikan kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, relevansi pendapatan daerah akan terus meningkat. Pendapatan daerah mengacu pada pendapatan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini sangat penting untuk meningkatkan otonomi pemerintah daerah dan memastikan bahwa daerah tersebut dapat mengelola operasi mereka secara efektif (Niswani et al., 2022). PAD komponen dalam pembiayaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PAD terdiri dari semua pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang sah dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan dan program daerah, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Pradana & Handayani, 2023).

Meskipun PAD merupakan sumber yang vital, optimisasi PAD masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah adanya ketergantungan yang masih tinggi pada subsidi pusat, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sering kali rendah (Achmad, 2024). Selain itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi, serta efektivitas pengelolaan sumber daya daerah (Akib et al., 2023).

Dana perimbangan memiliki tujuan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mengurangi kesenjangan dalam penyediaan layanan di seluruh daerah. Dana ini berperan penting dalam memastikan bahwa semua daerah dapat mempertahankan standar minimum layanan publik, sehingga mengatasi kesenjangan fiskal di antara pemerintah daerah (Salehoddin, 2023). Dana perimbangan menjadi dana untuk memungkinkan setiap daerah menjembatani kesenjangan anggaran, meningkatkan kesehatan fiskal mereka, dan mempromosikan pemerataan regional (Fatmasari et al., 2022).

Salah satu aspek penting dari dana perimbangan adalah dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana ini secara strategis, bersama dengan pendapatan mereka sendiri, untuk menyeimbangkan anggaran dan mengelola aset secara efektif. Misalnya, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dana perimbangan secara signifikan memengaruhi otonomi mereka dalam pengambilan keputusan keuangan (Kii et al., 2022). Praktik pengelolaan aset yang efektif, yang diinformasikan oleh ketentuan dari dana perimbangan, dapat mengarah pada kondisi fiskal yang lebih baik dan kemandirian keuangan yang lebih besar (Hou, 2003).

Belanja modal merupakan komponen vital dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yang berpengaruh besar terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran, yang memediasi pengaruh PAD terhadap realisasi belanja modal (Kasdy et al., 2019). Namun, di beberapa wilayah, pengeluaran untuk belanja modal dalam struktur anggaran daerah ternyata tidak selalu cukup memadai untuk menutup depresiasi aset tetap, membuktikan kebutuhan untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran (Lewis & Oosterman, 2011).

Belanja modal yang efektif adalah hasil dari sinergi antara kebijakan fiskal yang kuat, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Pemerintah daerah harus lebih responsif dalam mengalokasikan anggaran belanja modal untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, demi mencapai indeks pembangunan manusia yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan (Darunnisa & Herawansyah, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, tren pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menunjukkan peningkatan perhatian terhadap optimalisasi sumber pendapatan daerah serta efisiensi belanja modal yang ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai contoh, penelitian terbaru

menunjukkan bahwa variabel PAD dan dana perimbangan memiliki peran penting dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia (Fadilah & Andriani, 2025). Secara spesifik, penelitian oleh (Mulia & Widiatmoko, 2025) menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks empiris Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi & Aji, 2020) disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan daerah menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah daerah yang semakin kuat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri, yang mengindikasikan kinerja pemerintah daerah yang baik. Penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Padang & Padang, 2023) yang menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai sumber pendapatan utama daerah, PAD berperan penting dalam mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Efektivitas PAD dapat diukur melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi PAD, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri.

Tabel 1. 1 PAD Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

KAB/KOTA	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bengkayang	54,405,431,382	62,813,127,689	83,744,525,713	82,011,588,604	84,083,057,628
Kabupaten Kapuas Hulu	79,165,077,922	78,657,172,949	70,668,853,864	73,407,843,891	92,317,977,160
Kabupaten Kayong Utara	39,525,271,731	34,406,954,863	46,082,072,977	49,778,428,070	45,172,480,100
Kabupaten Ketapang	231,283,286,169	291,004,278,719	225,476,782,345	286,702,600,430	260,639,132,314
Kabupaten Kubu Raya	151,009,789,227	160,894,591,481	200,314,165,507	201,559,443,902	253,234,841,010
Kabupaten Landak	104,639,964,531	97,868,093,744	73,275,180,942	62,613,089,144	65,769,535,911
Kabupaten Melawi	30,872,004,587	56,170,124,296	43,673,906,224	34,872,892,535	54,592,105,549
Kabupaten Mempawah	98,615,210,565	96,153,931,297	154,466,054,038	148,988,046,415	147,446,161,319
Kabupaten Sambas	129,676,504,955	148,139,103,731	167,639,410,303	230,889,069,497	229,120,841,939
Kabupaten Sanggau	117,923,983,192	129,732,909,423	158,524,815,807	159,171,289,954	176,129,863,987
Kabupaten Sekadau	46,978,872,150	45,142,191,527	55,332,244,001	67,029,293,416	58,799,759,008
Kabupaten Sintang	134,829,357,443	176,520,346,649	162,366,717,402	172,973,442,066	179,045,685,318
Kota Pontianak	403,176,698,952	413,401,936,268	537,797,747,854	574,760,971,715	593,775,839,762
Kota Singkawang	163,382,873,106	175,494,901,486	213,790,179,584	244,316,898,931	272,080,297,920

Pada tabel 1.1 merupakan data PAD setiap daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2020-2024. Terlihat bahwa setiap daerah mengalami perubahan tren pendapatan yang berbeda-beda, baik peningkatan maupun penurunan. Perolehan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2024 di Kota

Pontianak, yaitu sebesar Rp593.775.839.762, dan perolehan PAD terendah terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Melawi, yaitu sebesar Rp30.870.000.000. Rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa struktur APBD masih didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD akan mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mencerminkan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang sehingga pemerintah daerah dapat dikategorikan memiliki kemandirian keuangan.

Selain ditinjau dari besarnya perolehan PAD, kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat melalui dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintahan daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah daerah seharusnya memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangkan, serta mengarahkan pendapatan daerah untuk kepentingan masyarakat dibandingkan kebutuhan aparatur. Penerapan otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Kondisi ini berkaitan erat dengan dana perimbangan, karena besarnya dana perimbangan yang diterima daerah akan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Apabila dana perimbangan meningkat, maka kapasitas fiskal daerah juga akan meningkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan daerah dapat berjalan lebih optimal. Namun demikian, dominannya peran dana perimbangan menunjukkan bahwa pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, sehingga peningkatan dana perimbangan tidak secara langsung mencerminkan kinerja keuangan pemerintah

daerah dengan baik, meskipun PAD tetap dipertahankan sebagai sumber pendanaan utama yang mencerminkan kemampuan daerah sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maulina et al., 2021) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita & Arza, 2024) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap dana perimbangan. Dana perimbangan berperan penting dalam mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Melalui dana perimbangan, pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan dana perimbangan yang optimal diharapkan dapat mendorong pengembangan dan kemajuan prasarana daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola dana perimbangan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tabel 1. 2 Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Kaliamntan Barat Tahun 2020-2024

KAB/KOTA	DANA PERIMBANGAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bengkayang	748,269,188,885	772,662,456,654	820,614,302,637	981,617,875,044	937,339,984,036
Kabupaten Kapuas Hulu	1,188,262,231,407	1,269,226,764,928	1,115,446,090,878	1,270,922,842,477	1,409,378,926,537
Kabupaten Kayong Utara	585,290,000,000	701,460,000,000	637,280,000,000	667,390,000,000	637,120,000,000
Kabupaten Ketapang	1,538,972,875,793	1,823,925,641,671	1,726,107,410,572	1,911,207,427,498	1,869,974,276,846
Kabupaten Kubu Raya	970,550,000,000	1,053,730,000,000	1,124,480,000,000	1,260,910,000,000	1,290,240,000,000
Kabupaten Landak	944,490,000,000	898,810,000,000	1,008,780,000,000	1,020,530,000,000	1,058,360,000,000
Kabupaten Melawi	714,361,740,201	960,878,513,632	923,904,293,637	982,709,901,290	999,467,201,033
Kabupaten Mempawah	691,997,751,192	738,527,915,601	754,208,398,243	770,278,262,089	853,541,157,478
Kabupaten Sambas	1,167,597,664,138	1,273,768,267,359	1,228,592,294,396	1,318,652,798,858	1,568,644,074,948
Kabupaten Sanggau	1,034,853,982,849	1,193,515,035,248	1,165,611,491,476	1,450,329,461,649	1,366,676,932,683
Kabupaten Sekadau	600,840,000,000	637,579,547,171	655,572,189,001	701,851,294,610	714,690,859,633
Kabupaten Sintang	1,194,279,447,503	1,287,092,362,149	1,178,604,716,170	1,382,926,838,146	1,461,797,611,489
Kota Pontianak	868,690,778,446	880,847,762,238	945,665,275,301	990,731,689,772	1,135,867,093,748
Kota Singkawang	538,187,770,068	606,276,727,141	626,016,356,719	648,494,293,184	657,919,064,328

Pada tabel 1.2 data dana perimbangan dari tahun 2020 sampai 2024 Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat dapat dilihat masih besarnya dan banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dana perimbangan paling besar diterima pada Kabupaten Ketapang di tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.959.541.548.456. Kota Singkawang pada tahun 2020 merupakan daerah yang paling kecil menggunakan dana dari pusat yaitu sebesar Rp538.187.770.068.

Pengalokasian dana perimbangan pada setiap daerah belum dijalankan secara merata, sehingga dapat berdampak pada perkembangan pelayanan masyarakat. Jika penyediaan pelayanan publik memadai maka dapat menarik kegiatan investasi pada daerah tersebut, sehingga membantu dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas serta adanya perbedaan temuan penelitian dengan penggunaan variabel yang sama, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelaahan kembali melalui penelitian lanjutan. Mengacu pada penelitian (Verawaty & Salwa, 2022), perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada penggunaan variabel dependen, periode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan periode tahun 2020 sampai 2024, serta objek penelitian yang mencakup 14 Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan memperkuat temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening**".

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah PAD dan Dana Perimbangan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, masalah yang menjadi perhatian pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

1.3.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontibusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya mengenai hubungan antara PAD, dana perimbangan, dan kinerja

keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model dan variabel penelitian yang relevan di bidang keuangan sektor publik.

1.5.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan PAD dan pemanfaatan dana perimbangan. Melalui pengelolaan belanja modal yang lebih efektif dan tepat sasaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan
2. Bagi Masyarakat

   Secara tidak langsung, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah melalui pengelolaan belanja modal yang lebih optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
3. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain, seperti lembaga pengawas, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, sebagai bahan informasi dan referensi dalam memahami pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Gambaran Kontekstual Penelitian

Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian dilakukan pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis

data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang tersebar di website setiap daerah.